

TARBAWY

JURNAL PENDIDIKAN ISLAM

Pengembangan Model Pendidikan Akhlak Berbasis Multikultural
Rosidi

Prinsip Pendidikan Nilai Tafsir al-Azhar
Ahmad Syarif H

Integrasi Nilai Antikorupsi pada Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam
Wahyudin Noor

Sejarah Kebijakan Pemerintah tentang Implementasi Pendidikan Agama Islam di Indonesia
Suparta

Kajian Retorika Kias Sindir dalam Bahasa Bengkulu
Vebbi Andra

Menjadi Guru Berkarakter (Sebuah Langkah Strategis Memperkuat Kurikulum 2013)
Rusydi Sulaiman

Multicultural Education: Perbedaan Agama di Indonesia
Fokus pada Kebijakan Nasional
Noblana Adib

Konsep Pengembangan Pendidikan Karakter Keagamaan pada Anak Usia Dini
Soleha

Penguatan Lembaga Pendidikan dan Perubahan Paradigma menuju Pemberdayaan Pendidikan
Zayadi

Struktur dan Formulasi Kurikulum STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
H. Janawi

TARBAWY

Vol. 2

No. 2

Hal.211-414

Petaling
Desember 2014

ISSN
2407-4462

JURUSAN TARBİYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG

Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari kajian analitis-kritis di bidang kajian pengembangan Ilmu Pendidikan Islam. ISSN 2407-4462

Penanggung Jawab
Syarifah

Redaktur
Noblana Adib

Penyunting Ahli
H. Janawi
Rusydi Sulaiman
Subardi

Desain Grafis
Darmawan

Sekretariat
Aisyah

Alamat Penyunting dan Redaksi: Gedung Tarbiyah STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik lantai 1 Jln. Raya Petaling KM 13 Mendo Barat-Bangka 33215 Telp. (0717) 436649, Fax. (0717) 439132, e-mail: jurnaltarbawwy@yahoo.co.id

Tarbawwy diterbitkan sejak 1 Juni 2014 oleh Jurusan Tarbiyah STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Penyunting menerima naskah tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS A4 spasi 1.5 sepanjang lebih kurang 20 halaman, dengan format seperti tercantum pada pedoman penulisan di bagian belakang jurnal ini. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya. **“isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis”**

DAFTAR ISI

Daftar isi	ii
Editorial	iii-vi
Lembar Abstrak	vii-xiv
Pengembangan Model Pendidikan Akhlak Berbasis Multikultural <i>Rosidi</i>	211-231
Pendidikan Nilai dalam Tafsir al-Azhar <i>Ahmad Syarif H</i>	232-252
Integrasi Nilai Antikorupsi pada Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam <i>Wahyudin Noor</i>	253-273
Sejarah Kebijakan Pemerintah tentang Implementasi Pendidikan Agama Islam di Indonesia <i>Suparta</i>	274-294
Kajian Retorika Kias Sindir dalam Bahasa Melayu Bengkulu <i>Febbi Andra</i>	295-316
Menjadi Guru Berkarakter (Sebuah Langkah Strategis Memperkuat Kurikulum 2013) <i>Rusdy Sulaiman</i>	317-331
Multicultural Education: Perbedaan Agama di Indonesia Fokus pada Kebijakan Nasional <i>Noblana Adib</i>	332-351
Konsep Pengembangan Pendidikan Karakter Keagamaan pada Anak Usia Dini <i>Soleha</i>	352-371
Penguatan Lembaga Pendidikan dan Perubahan Paradigma Menuju Pemberdayaan Pendidikan <i>Zayadi</i>	372-392
Struktur dan Formulasi Kurikulum STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung <i>H. Janawi</i>	397-419

STRUKTUR DAN FORMULASI KURIKULUM
STAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA
BELITUNG

Oleh : Janawi

Dosen STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

E-mail: melayu_bangka@yahoo.co.id

Naskah diterima tanggal 04/10/14; Dikembalikan untuk direvisi tanggal 30/10/14;
Disetujui tanggal 01/12/14

Abstract: *The curriculum of Islamic higher education needs to be evaluated and reviewed continuously in order to conform to the needs of market and social changes. Changing the curriculum should consider some aspects; regulations, structures of the course and science, content of courses, and it's acceleration to the vision, mission, and objectives of the institution, as well as the development of science and technology. In addition, the curriculum changes should be adjusted to the philosophical, psychological, sociological, religious principles and cultural values. These aspects will determine the application of curriculum as a guidance of learning in order to produce competent and capable graduates*

Keywords: *structures, the formulation of curriculum, KKNI*

Abstrak : *Kurikulum Pendidikan Tinggi Islam tetap menjadi topik pembicaraan. Kurikulum penting dilakukan evaluasi dan ditinjau secara berkesinambungan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan perubahan sosial. Perubahan kurikulum perlu memperhatikan regulasi-regulasi yang berlaku, struktur mata kuliah, struktur keilmuan, beban SKS, dan akselerasi dengan visi, misi, dan tujuan lembaga, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu perubahan kurikulum memperhatikan prinsip filosofis, psikologis, sosiologis, agama dan nilai-nilai kultural. Aspek-aspek tersebut akan menentukan struktur dan formulasi kurikulum yang diberlakukan sebagai pedoman pembelajaran dalam rangka menghasilkan kompetensi dan kerangka kualifikasi lulusan.*

Kata Kunci: *struktur, formulasi kurikulum, KKNI*

Perbincangan "diskursus" kurikulum, termasuk kurikulum pendidikan Tinggi Islam tetap menjadi topik hangat diskusi. Kurikulum selalu dilakukan evaluasi dan peninjauan secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan, karena kurikulum dituntut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan perubahan sosial, yang salah satunya disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum yang ada dipandang belum mampu menjawab kebutuhan dan belum mampu membentuk kerangka kualifikasi lulusan yang diharapkan. Kurikulum juga mengandung paradigma dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Dikotomi keduanya cenderung melahirkan sistem pendidikan yang ambigu antara sistem pendidikan agama dan sistem pendidikan umum, yang pada akhirnya sering dikenal dengan istilah perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi agama. Bahkan kedua kurikulum dan sistem pendidikan tersebut *seolah-olah dijustifikasi* dengan pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Akibatnya, titik temu paradigma tersebut sulit diunifikasi. Terlepas dari pemahaman tersebut, kurikulum tetap aktual diperbincangkan karena kurikulum merupakan salah satu standard penting dalam dunia pendidikan. Selain sebagai penentu capaian dan kerangka kualitas lulusan, kurikulum akan menentukan arah pengembangan lembaga pendidikan. Untuk itu perbincangan kurikulum adalah suatu kebutuhan sesuai dengan tuntutan "pasar".

Salah satu hal yang selalu didiskusikan dalam kurikulum adalah evaluasi dan penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan dan penyempurnaan kurikulum diarahkan pada upaya mencapai tujuan lembaga dan pencapaian Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana yang berlaku pada perguruan tinggi sekarang. Pencarian format dan formulasi yang memadai disesuaikan dengan berbagai pertimbangan. Perubahan kurikulum bukan hanya pada konstruksi paradigma, tetapi menyentuh aspek empirik. Walaupun demikian menurut Mastuhu, upaya pencarian tersebut tidak berarti bersifat reaktif dan defensif, yaitu menjawab kebenaran setelah adanya tantangan. Upaya tersebut lebih diarahkan pada penggalian nilai-nilai dasar dan strategis yang *aproaktif* dan *antisipatif*, mendahului perkembangan masalah yang akan muncul di masa mendatang, juga harus mampu mempertahankan nilai-nilai dasar yang benar dan diyakini untuk terus dipelihara dan dikembangkan¹.

¹Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm.

Peraturan Tinggi Agama Islam (PTAIN), salah satu solusi penyempurnaan kurikulum adalah memahami Islam secara komprehensif berdasarkan kategori keilmuan yang dikembangkan. Dalam pemahaman umum, konsep pendidikan selalu dihadapkan dengan pengertian Islam sebagai sesuatu yang final. Dalam konteks ini, Islam dapat dilihat sebagai kekuatan iman dan taqwa, sesuatu yang sudah final. Sedangkan kategori "ilmu", memiliki ciri khas berupa perubahan, perkembangan, dan tidak mengenal kebenaran absolut, bersifat relatif. Oleh karena itu Islam yang diamati melalui sudut pengembangan ipteks adalah sesuatu yang masih dalam proses, artinya masih terus-menerus dicari dan dikembangkan. Belajar terus tanpa henti untuk mencari dan menemukan Islam. Salah satu yang perlu direkonstruksi dan diformulasi dalam penyelenggaraan pendidikan Islam adalah struktur dan bangunan kurikulum yang akan dipakai.

B. Kenapa Perlu Peninjauan Kurikulum

Dalam Permendikbud nomor 49 Tahun 2014², kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program pendidikan. Kurikulum³ menjadi alat dan rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sebagai sebuah alat dan rencana, kurikulum mengalami siklus perubahan dan pengembangan sehingga tidak ada kurikulum yang bersifat permanen tanpa mengalami perubahan. Perlu dipahami bahwa perubahan kurikulum adalah sesuatu yang biasa. Karena tidak akan mungkin suatu kurikulum yang telah dirumuskan dapat bertahan lama, lebih dari 10 tahun. Kurikulum dapat dikatakan sebagai kurikulum usang. Artinya, kurikulum tersebut tidak sesuai lagi dengan tuntutan sosial, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ipteks, dan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dunia kerja. Kurikulum tersebut

² Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

³ Kurikulum berasal dari bahasa Yunani (*curere*), yang berarti jarak tempuh lari. Dalam kegiatan berlari, jarak yang harus ditempuh adalah mulai dari *start* sampai *finish*. Jarak inilah yang disebut *curere*. Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum* (Jakarta: RajaGrafindo, 1993), hlm. 1. Pendapat lain, pada mulanya kurikulum dijumpai dalam dunia atletik pada zaman Yunani kuno. Menurut Zainal Arifin kurikulum juga berasal dari kata *courier* (dalam bahasa Prancis), berarti berlari. Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 1. Kurikulum juga dapat berasal dari kata *curere* berarti tempat berpacu atau tempat beriditempuh pelariomba. Sedangkan *curriculum* mempunyai arti "jarak" yang harus ditempuh pelari. Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Press, 2002) hlm. 33. Dalam kosa kata Arab, istilah kurikulum dikenal dengan kata *manhaj* yang berarti jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai kehidupannya. Omar Mohammad al-Thoumy Al-Syaibany, *Falasafah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 478.

harus diperbaharui. Untuk itu, kurikulum yang digunakan dunia pendidikan bersifat dinamis, menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan. Akan tetapi tidak semua perubahan kurikulum dapat meningkatkan kualitas. Karena kurikulum bersifat hipotesis yang pelaksanaannya banya bergantung pada pelaksana (pendidik dan atau lembaga). Untuk itu, Sardiman menegaskan bahwa pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh; [1] prinsip orientasi pada tujuan; [2] prinsip relevansi; [3] prinsip efisiensi; [4] prinsip keefektifan; [5] prinsip fleksibilitas; [6] prinsip obyektivitas; [7] prinsip kontinuitas; [8] prinsip sinkronitas; [9] prinsip integritas; dan [10] prinsip demokratis⁴

Dengan demikian, kurikulum bersifat responsive. Kurikulum selain harus disusun secara *up to date*, juga memperhatikan nilai-nilai yang berlaku, tuntutan pasar dan lulusan yang kompetitif. Di samping itu, pengembangan kurikulum ditingkat universitas, institut, dan sekolah tinggi harus *compatible* dengan zaman. Kurikulum harus *match* dengan dunia kerja, tidak cukup hanya dengan memberikan pengetahuan yang dihimpun dalam berbagai macam mata kuliah, tapi tidak *match* dengan dunia kerja.

Bertitik tolak dari pernyataan di atas, kurikulum mutlak dilakukan evaluasi, peninjauan, dan perubahan sesuai dengan tuntutan zaman⁵. Evaluasi dan peninjauan tidak semata-mata harus mengalami perubahan pada sisi mata kuliah, tetapi peninjauan dilakukan dengan melakukan inovasi dan improvisasi pada silabus. Walaupun akhir dari evaluasi dan peninjauan kurikulum melakukan perubahan, namun perubahan kurikulum dan perubahan kurikulum disesuaikan dengan konteks kebutuhan. Dengan demikian, perubahan kurikulum mengalami siklus dan siklus itu perlu mempertimbangkan asas interval waktu. Standard ideal perubahan kurikulum perlu dijadikan sebagai komitmen untuk pengembangan pencapaian kualitas lulusan. Kurikulum tidak boleh didasarkan pada "selera" atau kebutuhan sesaat.

Evaluasi, peninjauan dan bahkan perubahan kurikulum mutlak dilakukan secara berkesinambungan. Perubahan tersebut, menurut Tilaar diantaranya merupakan proses pembentukan standar mutu dan kompetensi lulusan.⁶ Unsur-unsur yang dapat dievaluasi berkenaan dengan efektivitas, struktur, proses penggunaan, konteks waktu,

⁴ Sudirman, et. All, *Ilmu Pendidikan* (Bandung: Remaja Karya, 1988), hlm. 30-31.

⁵Perubahan masa depan dan pembangunan masyarakat banyak bergantung pada dunia akademik dan peranan pendidikan tinggi. H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 91-93.

⁶H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10-12.

substansi kurikulum itu sendiri, dan tujuan yang akan dicapai sebagaimana yang telah digambarkan dalam visi lembaga. Dalam konteks ini, kurikulum perguruan tinggi seperti STAIN mutlak dilakukan evaluasi, peninjauan, dan perubahan. Bahkan Sudaryono, Guru Besar UGM dalam acara Dies Natalis UGM Desember 2013, menyampaikan "Trilogi Ristek – Dikti – Industri. Kurikulum akan mengalami perubahan paradigma seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah.⁷ Dalam konteks ini STAIN SAS Babel pun perlu melakukan perubahan paradigma kurikulum. Apakah paradigma induktif atau deduktif sebagaimana yang diungkapkan Suharyono. Yang terpenting adalah perubahan kurikulum didasarkan pada membangun paradigma yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

C. Sekilas Perkembangan Kurikulum PTAI

1. Kurikulum 1995

Kurikulum 1995 merupakan perubahan dari kurikulum 1990 yang terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Kurikulum nasional terdiri dari 60 persen dan kurikulum lokal terdiri dari 40 persen. Salah satu ciri kurikulum 1995 adalah: 1] mata kuliah dan silabus kurikulum nasional disusun dan diberlakukan secara nasional. Sedangkan kurikulum lokal, mata kuliah dan silabusnya disusun oleh IAIN masing-masing; 2] umumnya mata kuliah masih ditawarkan dengan bobot 2 SKS, kecuali untuk mata kuliah tertentu seperti praktek lapangan, KKN, dan skripsi; 3] komponen mata kuliah terdiri dari seperti MKDU dan MKDK; 4] jumlah SKS umumnya 160 SKS. Kurikulum ini berjalan kurang lebih 2 tahun.

2. Review Kurikulum 1995.

Belum lama diberlakukan, pada tanggal 26 Juni – 18 Juli 1995, Kementerian Agama (waktu itu Departemen Agama) melakukan Orientasi Kurikulum Nasional IAIN. Sambutan terhadap kurikulum 1995 dianggap baik. Walaupun demikian, saran dan kritik banyak disampaikan, yang esensinya bertujuan untuk penyempurnaan kurikulum itu sendiri. Saran dan kritik yang disampaikan disampaikan para akademisi meliputi:⁸

Pertama, menyangkut penyempurnaan isi atau topik-topik inti kurikulum. Topik inti disusun "terkesan" tergesa-gesa sehingga dianggap kurang sempurna. Unsur mata kuliah kurnas dan mata kuliah kurlok masih belum menganut keterpaduan (*integrity*) dan kemenyeluruhan (*comprehensiveness*). Keterkaitan ilmu-ilmu keagamaan

⁷ Sudaryono, "Trilogi Ristek – Dikti – Industri", *Kompas* 6 November 2014, hlm. 6.

⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Nodernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 201.

dan ilmu-ilmu umum yang telah dibuka oleh jurusan-jurusan tertentu juga dikritik. Di samping itu tumpang tindih (*over lapping*) topik inti masih tampak yang tersebar pada beberapa mata kuliah misalnya Dirasah Islamiyyah, Tafsir, Hadis, Ilmu kalam, Fikih, dan lainnya. Pengulangan itu cenderung bersifat "repetisi," bukan pendalaman materi. Keluasan materi tersebut semakin "bias" bila dihubungkan dengan kualifikasi ketersediaan tenaga dosen yang ada.

Kedua, menyangkut pembinaan mata kuliah dalam wujud konsorsium sejenis pada tingkat nasional. Untuk memperkuat kualitas, lembaga dituntut untuk membentuk konsorsium mata kuliah sejenis. Konsorsium dituntut tidak hanya membentuk kesetaraan dan keseragaman standar kualitas pembelajaran, tetapi juga sangat mendukung upaya peningkatan dan pengembangan bidang-bidang keilmuan yang ada di PTAI. Langkah nyata dari pemikiran tersebut memunculkan istilah "dosen payung" mata kuliah sejenis dan "team teaching". Dalam istilah lain juga digunakan istilah konsorsium rumpun mata kuliah. *Ketiga*, penyediaan tenaga pengajar yang *qualified* untuk mengajarkan mata kuliah tertentu. Peningkatan kualitas tenaga dosen dapat dilakukan melalui *upgrading* dan memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengambil program magister dan doktor baik di dalam maupun luar negeri. Tuntutan ini untuk memenuhi kebutuhan spesialisasi keilmuan sehingga memenuhi *link and match*.

Keempat, penyediaan buku dasas dan literatur yang memadai. Buku dasas, di samping untuk memenuhi kebutuhan referensi bidang keilmuan, juga memotivasi dosen untuk melahirkan karya. *Kelima*, peningkatan input IAIN melalui seleksi yang lebih ketat. Seleksi ketat harus dilakukan agar diperoleh input yang memiliki kualifikasi yang baik. *Keenam*, peningkatan mutu perkuliahan melalui program "pertukaran dosen" (*lecturer exchange*) baik antar sesama IAIN maupun dengan luar negeri. Langkah ini perlu dilakukan untuk membangun kesetaraan atmosfer akademik dan semangat berkompetisi dikalangan dosen. *Ketujuh*, penyediaan prasarana penunjang proses pengajaran yang lebih memadai. Penyediaan prasarana menjadi penting untuk mendukung capaian hasil yang optimal sesuai dengan bidang keilmuan yang ada di PTAI.

3. Kurikulum 1997

Setelah kurang lebih dua tahun kurikulum 1995 digunakan, IAIN dan STAIN dikejutkan dengan rancangan pemberlakuan kurikulum 1997. Dirjen Binbaga Islam⁹, Prof. A. Malik Fadjar menyebut kurikulum

⁹Sebelum dirubah menjadi Dirjen Pendis. Prof. A. Malik Fadjar dianggap sebagai salah seorang tokoh sentral yang menyuarakan evaluasi kurikulum 1995 dan pemberlakuan kurikulum 1997.

1997 sebagai "kurikulum modifikasi kurikulum 1995". Umumnya para akademisi memberi kritik, "jangan-jangan" pemberlakuan kurikulum 1997 hanya bersifat formalisme. Atau bahkan kurikulum baru muncul karena dampak dari pergantian Dirjen atau istilah yang sering muncul "ganti Dirjen, ganti kurikulum"¹⁰ Kekhawatiran kalangan akademisi pun terjadi. Diantara pertanyaan yang dikedepankan adalah kenapa kurikulum 1995 diganti dengan kurikulum 1997. Sikap pesimisme pun menggelora, karena beberapa alasan, seperti; *Pertama*, kurikulum 1995 baru dilaksanakan secara menyeluruh baru dalam waktu dua tahun. Kurikulum tersebut belum diterapkan secara sempurna dan bahkan belum dapat dievaluasi hasilnya. Oleh karena itu, perubahan tersebut dianggap terlalu cepat. *Kedua*, banyaknya mata kuliah pada kurikulum 1995 yang tidak dimasukkan lagi pada kurikulum 1997 baik pada tingkat institut maupun fakultas dan jurusan. Di samping itu, kurikulum 1997 menerbitkan mata kuliah baru sebagai pengganti mata kuliah kurikulum 1995, misalnya Dirasah Islamiyyah diganti dengan Metodologi Studi Islam. Penghapusan mata kuliah dan penggantian nama mata kuliah baru dikhawatirkan terkait dengan "nasib" dosen-dosen yang mengampu mata kuliah tersebut dan keilmuan dosen yang cenderung dipaksakan untuk mengampu nama mata kuliah yang baru.

Akan tetapi, argumentasi peninjauan kurikulum 1995 dijadikan sebagai bahan penting untuk menerbitkan kurikulum yang lebih baik. Kenapa kurikulum perlu ditinjau, karena kurikulum 1995 dianggap "kurang manusiawi." Kurikulum tersebut dipandang memberikan beban yang sangat berat kepada mahasiswa. Di samping itu banyak mata kuliah yang *overlapping*. Dampaknya pengetahuan mahasiswa cenderung terkotak-kotak yang semestinya terintegrasi secara komprehensif. Mahasiswa dianggap memiliki pengetahuan "bagian kulit" saja, kurang mendalam dalam segmen "substansifnya". Matakuliah yang satu dengan yang lainnya kurang terintegrasi. Untuk itu diperlukan keberanian moral bagi PTAI dan para dosen melakukan perubahan. Itulah sebabnya kurikulum 1995 dirubah menjadi kurikulum 1997.

4. Produk Kurikulum 1997

Secara substantif, kurikulum 1997 digunakan bertitik tolak dari pertimbangan filosofis dan capaian kualifikasi yang diharapkan oleh PTAI. Terlepas dari kelemahan yang dimiliki, beberapa kelebihan kurikulum 1997 adalah¹¹; *Pertama*, kurikulum ini disusun oleh banyak dosen dan kelompok pakar dalam suatu rumpun mata kuliah-mata kuliah tertentu. Pakar keilmuan yang ditunjuk tidak hanya dosen-

¹⁰Azyumardi Azra, *Pendidikan ...*, hlm. 207.

¹¹*Ibid.*, hlm. 210-212.

dosen yang berasal dari IAIN, tetapi juga berasal dari non IAIN. *Kedua*, kurikulum 1997 dianggap lebih sederhana dalam rumusan muatannya. Kesederhanaan muatan itu menjadi karakter dari kurikulum 1997. *Ketiga*, mata kuliah direstrukturisasi untuk menghindari *overlapping* mata kuliah. *Keempat*, adanya keberanian moral dan pro-aktif dosen yang tergabung dalam konsorsium keilmuan masing-masing.

Kelebihan-kelebihan tersebut menjadi ciri penting dari produk kurikulum 1997. Karakteristik utama yang dapat diperhatikan dari kurikulum 1997 seperti;

Pertama, membumikan istilah kurikulum nasional (kurnas) dan kurikulum lokal (kurlok) atau muatan lokal (mulok). Kurnas diberlakukan sebesar 60 persen dan kurikulum lokal atau muatan lokal sebesar 40 persen. Pemberlakuan kurnas sebagai proses unifikasi kualitas lulusan. Jumlah mata kuliah, nama-nama mata kuliah, dan besaran SKS, termasuk silabus diberlakukan secara nasional. Yang menjadi karakteristik pembeda PTAI yang satu dengan yang lainnya diwujudkan pada kurlok/mulok. Muatan lokal dijadikan sebagai upaya pengembangan dan pengayaan kemampuan "minor" (keahlian atau kompetensi tambahan), di samping "mayor" (kompetensi pokok). Muatan "minor" berupa kemampuan *vocational* (ketrampilan) dan atau keahlian tambahan sesuai dengan situasi dan kebutuhan lapangan kerja lokalitas IAIN/STAIN, seperti komputer, manajemen dan lain sebagainya.

Kedua, struktur kurikulum lebih jelas, ramping, dan umum, yang terdiri dari mata kuliah umum (MKU), mata kuliah dasar keahlian (MKDK) yang keduanya menjadi komponen institut atau Sekolah Tinggi, dan mata kuliah keahlian (MKK). *Ketiga*, jumlah mata kuliah lebih sedikit dan umumnya terdiri dari tiga SKS.

5. Formulasi dan Struktur Kurikulum Berbasis Kompetensi

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003¹² Pasal 35 mengamanatkan adanya standar pendidikan nasional. Pasal ini menjadi acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan dan sebagainya. Walaupun pasal tersebut menyatakan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan tersebut dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan serta akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berinisiatif memberikan keleluasaan pada PTAI mengelola kurikulum berbasis kompetensi lulusan. Namun demikian keleluasaan pengelolaan kurikulum berbasis

¹²UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.